

DAFTAR PUSTAKA

A Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015
- Gustav Radbruch, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- _____, *Legal Philosophy*, konsep tiga nilai dasar hukum.
- _____, *Menguak Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012,
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2014.
- _____, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- _____, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- _____, *Ruang Lingkup Permasalahan Perdata*, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- R. Tresna, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 2008.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 2001.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 2005.
- _____, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- _____, *Ruang Lingkup Permasalahan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- _____, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty,

2015.

_____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

B Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ariyanto, Dwi. “Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perspektif Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 5 No. 2, 2020.

M. Philipus, Hadjon “Batasan Kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Volume 7 Nomor 3, 2013.

M. Yahya Harahap “Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 2, 2015.

Putri, Rahma Yuliana. “Analisis Cacat Formil Gugatan dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2019.

R. Bintan, Saragih “Kompetensi Absolut Pengadilan dalam Sengketa yang Bersinggungan dengan Tindakan Administrasi Pemerintah.” *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 1, 2018.

Retnowulan, Sutantio. “Gugatan Perdata dan Permasalahan Cacat Formil dalam Praktik Peradilan.” *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6 Nomor 2, 2017.

Siregar, Muhammad Iqbal. “Keadilan Prosedural dalam Putusan Pengadilan Perdata.” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8 No. 3, 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015

Sudikno. Mertokusumo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Hukum

Teguh, Prasetyo. “Peran Hakim dalam Menjaga Tertib Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Yudisial*, Volume 9 Nomor 2, 2016.

C Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb.

D Sumber Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

<https://www.mahkamahagung.go.id>

<https://www.hukumonline.com>